

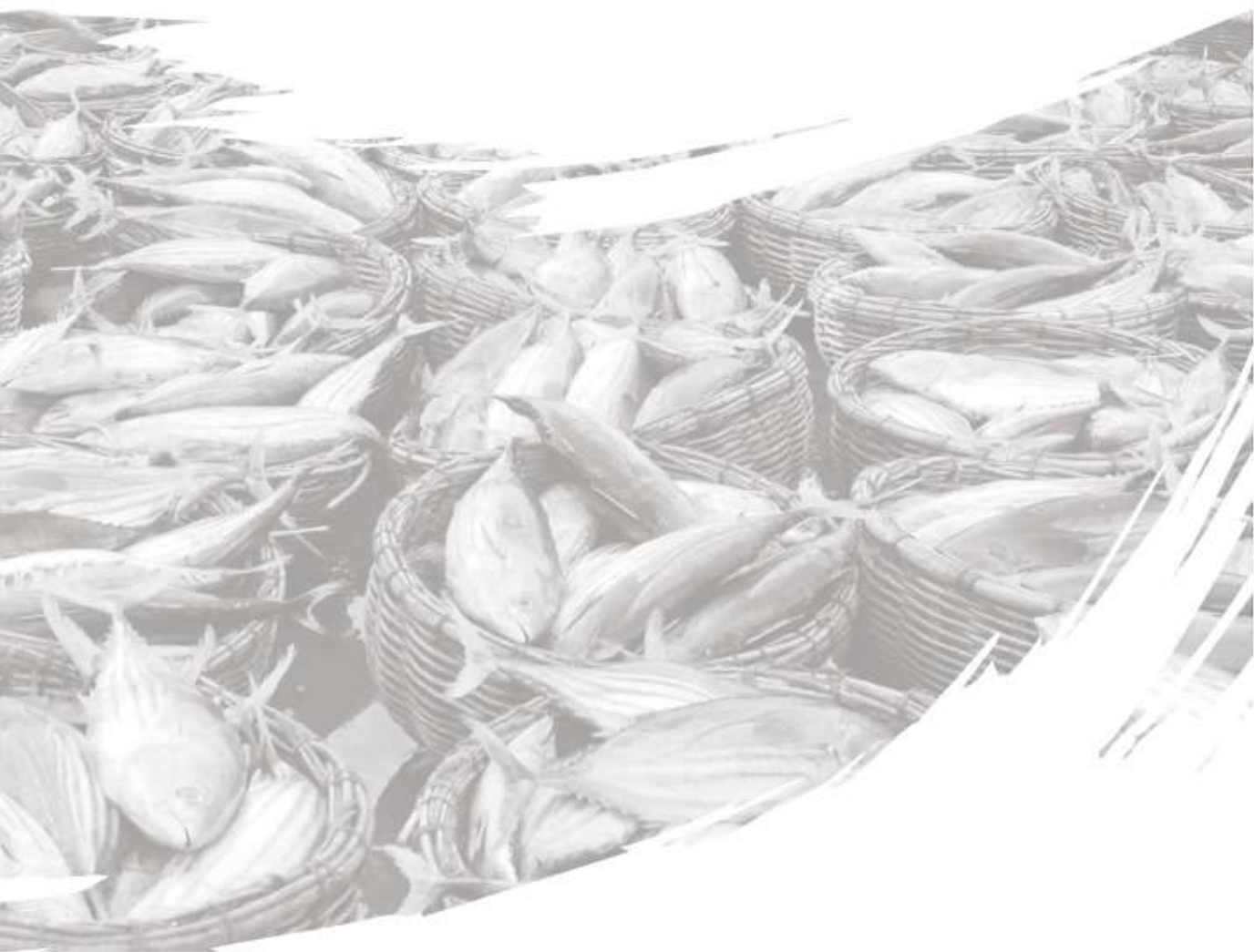


Analisis Indikator Kinerja Utama
Kelautan dan Perikanan Indonesia

NTN DAN NTPi

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017





Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017

ISBN 978-602-1278-19-2



9 786021 278192



Analisis Indikator Kinerja Utama
Kelautan dan Perikanan Indonesia

NTN DAN NTPi

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017



**Analisis Indikator Kinerja Utama Kelautan
dan Perikanan Indonesia: Nilai Tukar Nelayan
(NTN), dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)**

Naskah

Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pengarah

Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc.

Penanggung Jawab

Ismayanti, DFM., DEA.

Editor

1. Rennisca Ray Damanti, S.Pi., MA., M.Eng.
2. Dhina Arriyana, S.Si.
3. Rikrik Rahadian, ME.

Penyusun

1. Dr. Ir. Soen'an Hadi Poernomo, M.Ed.
2. Krisna Fery Rahmantya, S.Si.
3. Anggie Destiti Asianto, S.Si.

Publikasi

Pusat Data, Statistik, dan Informasi

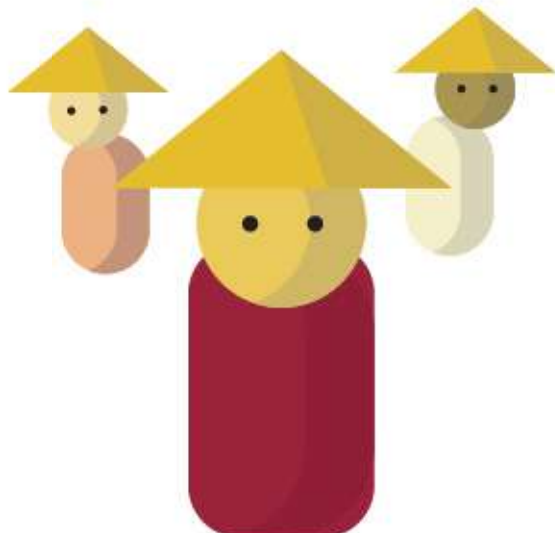
Ukuran Buku

18,5 cm x 26 cm

Jumlah Halaman

viii + 24 Halaman

ISBN : 978-602-1278-19-2



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya, maka telah tersusun buku “Analisis Data Indeks Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan: Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2017”.

Buku Analisis ini menyajikan penjelasan atau analisis deskriptif sederhana mengenai sebagian indikator ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama dimensi ekonomi kegiatan pelaku usaha perikanan, yakni yang terkait dengan NTN dan NTPi 2017.

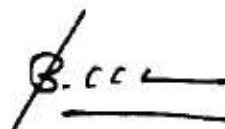
Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk digunakan sebagai salah-satu bahan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Buku ini tentu berfungsi pula sebagai informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat lainnya.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Kritik ataupun saran akan dijadikan bahan masukan yang sangat berhargaguna peningkatan kualitas publikasi selanjutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi, baik tenaga maupun pikiran, sehingga buku ini dapat tersusun dan diterbitkan.

Jakarta, Desember 2017

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,



Budi Sulistiyo



RINGKASAN EKSEKUTIF

Analisis data ini mencakup empat pembahasan secara analisis deskriptif sederhana, mengenai Nilai Tukar Nelayan (NTN serta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tahun 2017 dan tahun sebelumnya, disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sering digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan nelayan. NTN dihitung dari Indeks Harga yang Diterima nelayan (It), dibagi dengan Indeks Harga yang Dibayar nelayan (Ib), baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun untuk biaya produksi.

NTN dari tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami peningkatan, karena It mengalami peningkatan selalu lebih besar dari Ib; Dalam komponen It, posisi lebih tinggi/ lebih rendah tidak ada kepastian, antara penangkapan di perairan umum dan di laut; Dalam komponen Ib, IKRT selalu lebih besar dari pada IBPPBM, dan harga bahan makanan sering paling mahal; Tidak terdapat korelasi antara besaran nilai produksi penangkapan ikan dengan besaran NTN;

Sebaiknya pemilihan lokasi kabupaten dan desa untuk dijadikan sampel NTN, dipilih kawasan yang berpotensi tinggi dalam kegiatan penangkapan ikan. Tidak dipengaruhi oleh pertimbangan adanya potensi sektor pertanian dan kehutanan.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

NTPi dari tahun 2013 hingga 2017 terdapat fluktuasi, karena beberapa tahun Ib NTPi mengalami peningkatan lebih besar dari It NTPi; Dalam komponen It, posisi lebih tinggi/ lebih rendah tidak ada kepastian, antara budidaya perikanan di air tawar dan air payau. Untuk budidaya di laut senantiasa menunjukkan nilai yang terendah; Dalam komponen Ib, IKRT selalu lebih besar dari pada IBPPBM, dan harga bahan makanan sering paling mahal; Tidak ada korelasi antara besaran nilai produksi budidaya perikanan dengan besaran NTPi;

Sebaiknya pemilihan lokasi kabupaten dan desa untuk dijadikan sampel NTPi, dipilih kawasan yang berpotensi tinggi dalam kegiatan budidaya perikanan. Tidak dipengaruhi oleh pertimbangan adanya potensi sektor pertanian dan kehutanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
BAB II METODOLOGI	3
Definisi	4
BAB III NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)	5
Komponen NTN	6
Korelasi dengan Nilai Produksi	8
Hasil Analisis	9
BAB IV NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi)	11
Komponen NTPi	12
Korelasi dengan Nilai Produksi	14
Hasil Analisis	15
BAB V PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	NTN, It dan Ib tahun 2013-2017	6
Tabel 2.	NTN Agustus 2017	7
Tabel 3.	Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTN Tertinggi tahun 2015	8
Tabel 4.	Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTN Terendah tahun 2015	8
Tabel 5.	NTPi, It dan Ib tahun 2013-2017	12
Tabel 6.	NTPi Agustus 2017	13
Tabel 7.	Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTPi Tertinggi tahun 2015	14
Tabel 8.	Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTPi Terendah tahun 2015	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. NTN Bulanan, 2014 - 2017	6
Gambar 2. Rincian NTN Per Agustus 2017	7
Gambar 3. Perkembangan Rata-rata NTPi, 2013-2017	12
Gambar 4. Rincian NTPi Per Agustus 2017	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rata-rata NTN Per Provinsi, 2013-2017	20
Lampiran 2. Rata-rata NTPi Per Provinsi, 2013-2017	22

BAB I

PENDAHULUAN



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang diamandemen tahun 2000, dalam pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini menegaskan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, harus memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi nyata sebagai negara maritim.

Dalam dimensi ekonomi dan sosial, sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan unsur dominan terhadap perekonomian negara, dan sumberdaya manusianya juga tidak terlepas dari aspek kemaritiman. Oleh karenanya, melihat Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), dapat dijadikan salah satu indikator ekonomi serta sosial masyarakat negara kepulauan ini.

Latar Belakang

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomer 17 tahun 2007, adalah 'Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional', dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, serta membangun ekonomi secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kerangka pencapaian tujuannya dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda tersebut, yang terkait langsung dengan bahasan mengenai NTN dan NTPi adalah prioritas pembangunan nomor 3, 5, 6 dan 7.

Atas dasar misi RPJPN 2005-2025 tersebut diatas, yang juga kemudian menjadi visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta berdasarkan pada RPJMN 2015-2019, maka Kementerian ini menetapkan misi pembangunannya berpilar pada tiga hal pokok, yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*). **Kedaulatan**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perairan, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkannya, sehingga mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. **Keberlanjutan**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berprinsip ramah lingkungan, serta menjaga kelestariannya. Adapun **kesejahteraan**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, NTN dan NTPi, tentu lebih berkaitan langsung dengan pilar kesejahteraan, dengan tetap memertimbangkan aspek kedaulatan dan keberlanjutan.

Tujuan

Tujuan analisis data NTN dan NTPi ini adalah:

1. Analisis data NTN dan NTPi diharapkan menjadi salah satu acuan untuk penetapan kebijakan (*Decision Support System*), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi, kerja sektor kelautan dan perikanan;
2. Analisis data NTN dan NTPi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), investor, dan masyarakat lainnya, sebagai informasi yang lebih lengkap, akurat dan mutakhir;
3. Hasil analisis data NTN dan NTPi merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB II

METODOLOGI



Analisa data ini dilakukan dengan metode Analisa Deskriptif Sederhana, terhadap data yang sudah ada dari penyedia data, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). NTN dan NTPi dalam analisa diantaranya melihat korelasinya satu sama lain, serta disandingkan pula dengan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Instrumen yang dipakai adalah Koefisien Korelasi Spearman dan Koefisien Korelasi Pearson, dengan tingkat kepercayaan 95%.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah hasil kerjasama antara BPS dan KKP. Pada mulanya pada tahun 2007, dicoba di dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saat ini telah dilaksanakan di seluruh provinsi. NTPi dihitung mengikuti pergerakan harga pasar suatu produk dari waktu ke waktu, yang dihitung pada tahun dasar.

Metode yang digunakan adalah sampling, yaitu terhadap kabupaten/kota yang terpilih, yakni suatu kawasan yang memiliki semua kegiatan pertanian termasuk didalamnya adalah tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Jadi wilayah sampelnya tidak fokus pada kegiatan pembudidayaan ikan. Setelah didapat kabupaten terpilih, selanjutnya dicari lagi kecamatan-kecamatan sampel, dan dari setiap lokasi akan dipilih 1-10 rumah tangga sampel, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah anggota rumah tangga (ART) $1 < \text{ART} < 11$;
2. Minimal 1 ART memiliki usaha pada salah satu subsektor perikanan budidaya;
3. Penghasilan rumah tangga setahun $> 50\%$ berasal dari usaha di sektor perikanan;
4. Produk komoditasnya sudah dihasilkan dan dijual setahun yang lalu;
5. Rumah tangga terpilih berdomisili di wilayah sampel minimal 1 tahun;
6. Usaha di subsektor perikanan tidak berbadan hukum.

Nelayan dan pembudidaya ikan yang dijadikan responden hanya yang memiliki sarana produksi, dan sedang aktif melakukan kegiatan profesinya. Dengan demikian maka nelayan yang berposisi sebagai anak buah kapal atau pembudidaya ikan yang berstatus hanya sebagai penggarap tidak tergolong sebagai responden dalam NTN dan NTPi.

Definisi

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu, disajikan yang menjadi salah satu indikatornya, yaitu NTN dan NTPi.

NTN merupakan alat ukur kemampuan tukar ikan hasil tangkapannya, terhadap barang/ jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangganya. NTN adalah rasio antara Indeks Harga yang Diterima (It), dengan Indeks Harga yang Dibayar (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100, artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau memperoleh surplus. Sebaliknya, bila NTN kurang dari 100, berarti pengeluaran nelayan untuk biaya produksi dan konsumsi rumah tangganya lebih tinggi dari pendapatan hasil penangkapan ikannya.

It dari waktu ke waktu seringkali menunjukkan perubahan harga dari sekelompok jenis ikan tertentu, sehingga dapat dianggap sebagai inflasi harga ikan di tingkat produsen, atau nelayan. It terdiri dari hasil penangkapan di laut, dan penangkapan di perairan umum. Adapun Ib merupakan harga yang dibelanjakan nelayan, terdiri dari Indeks Barang Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM) serta Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IBPPBM meliputi biaya transportasi, penambahan barang modal, upah buruh, biaya sewa dan pengeluaran lain. Adapun IKRT terdiri dari pengeluaran biaya untuk bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi dan komunikasi.

Seperti halnya NTN, NTPi merupakan alat ukur kemampuan tukar ikan budidaya yang dihasilkan (It), terhadap barang/ jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangganya (Ib), yang dinyatakan juga dalam persentase. Apabila NTPi lebih dari 100, berarti pembudidaya ikan memperoleh keuntungan, sedangkan jika kurang dari 100, ia menanggung kerugian.

It dari NTPi meliputi penerimaan dari hasil budidaya air tawar, budidaya laut, dan budidaya air payau. Ib dari NTPi memiliki IKRT yang jenis pengeluarannya sama dengan IKRT pada NTN. Adapun IBPPBM-nya terdiri dari biaya produksi untuk benih, pupuk, obat-obatan, pakan, transportasi, penambahan barang modal, upah buruh, biaya sewa dan pengeluaran lain.

BAB III

NILAI TUKAR NELAYAN (NTN)



Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara definitif adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b), yang dinyatakan dengan persentase. NTN dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan nelayan, dalam hal ini hasil penangkapan ikan, terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maupun kebutuhan produksi. Apabila NTN lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Dan sebaliknya, apabila NTN kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya.

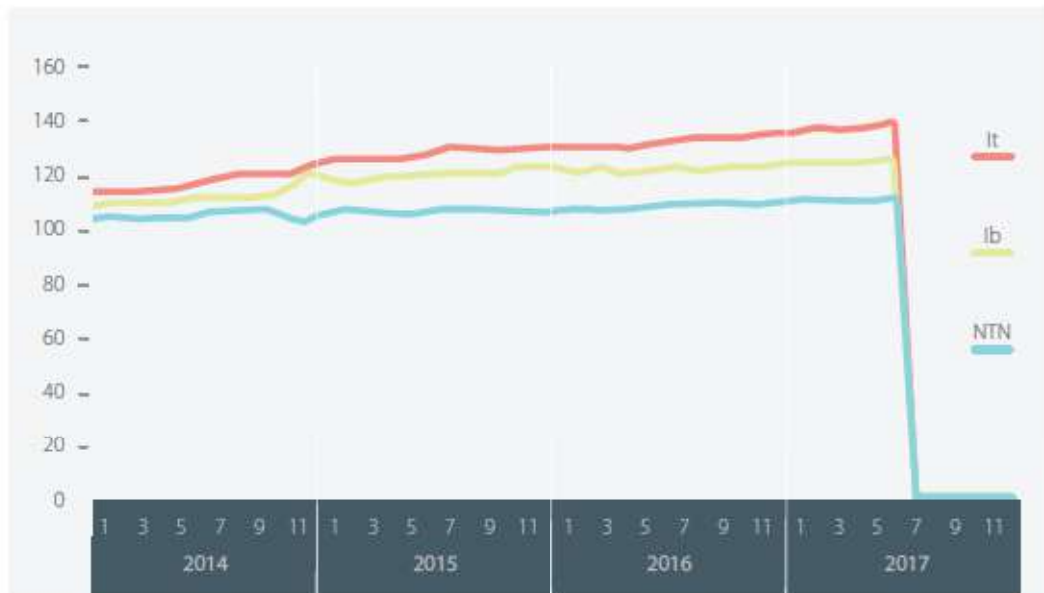
I_t NTN adalah indeks harga komoditas ikan yang dihasilkan nelayan, baik dari penangkapan di laut, maupun di perairan umum. Nilai I_t bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu pada ikan yang sama.

I_b merupakan indeks harga barang yang dibelanjakan oleh nelayan, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maupun untuk keperluan produksi atau penambahan modal. I_b NTN juga selalu mengalami perubahan harga. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) terdiri dari biaya untuk bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi dan komunikasi. Indeks Barang Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM), meliputi keperluan untuk transportasi, penambahan barang modal, upah buruh, biaya sewa dan keperluan lain.

NTN menjadi salah satu pilihan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu, dibandingkan dengan tahun dasarnya (saat ini menggunakan data tahun dasar 2012). Seharusnya NTN juga di spesifikkan bagi alat penangkapan ikan tertentu. Berlainan alat tangkap yang digunakan, tentu berbeda pula barang produksi yang dibayarnya. Apalagi di Indonesia yang berada pada kawasan tropis, kondisi sektor perikananannya bersifat aneka jenis ikan (*multi species*) dan aneka alat (*multi gears*).

Tabel 1. NTN, It dan Ib tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata It	110.79	116.90	127.17	131.70	137.86
Pertumbuhan It (%)	-	5.51	8.78	3.56	4.68
Rata-rata Ib	108.04	111.74	119.80	121.67	124.75
Pertumbuhan Ib (%)	-	3.42	7.21	1.56	2.53
NTN	102.55	104.63	106.14	108.24	110.50

**Gambar 1. NTN Bulanan, 2014 - 2017**

Apabila diperbandingkan antara It, Ib dan NTN, kelihatan bahwa dari tahun ke tahun semua mengalami kenaikan, dan setiap tahun nilai It dengan tingkat pertumbuhannya senantiasa lebih besar dari Ib. Oleh karenanya, nilai NTN juga selalu di atas 100.

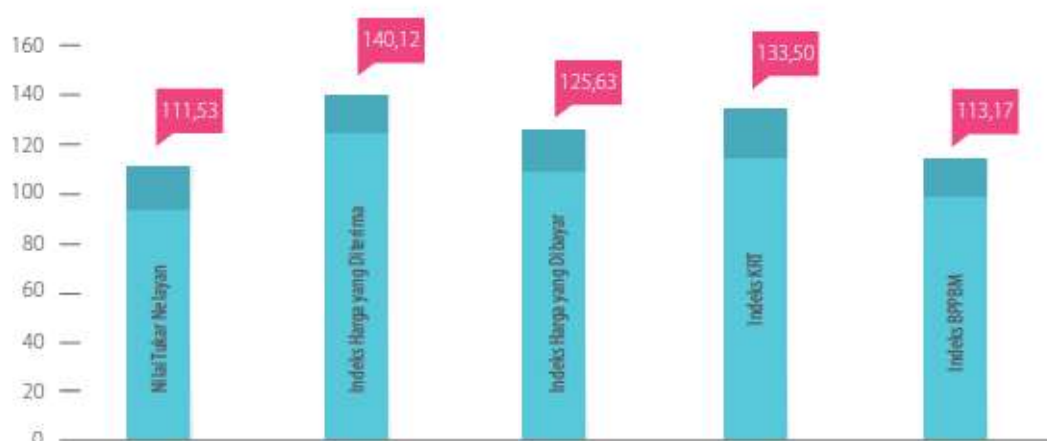
Komponen NTN

Apabila dilihat dari komponen dari Indeks Harga yang Diterima, tidak ada kepastian komponen yang lebih besar. Kadang-kadang indeks harga komponen penangkapan di laut lebih tinggi, tapi terjadi pula saat waktu yang berbeda, indeks harga komponen penangkapan ikan di perairan umum lebih tinggi.

Lain halnya dengan komponen Indeks Harga yang Dibayar, hampir senantiasa Indeks KRT lebih besar dari Indeks BPPBM. Adapun urutan dari yang terbesar, sebagai contoh pada data NTN bulan Agustus 2017 adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. NTN Agustus 2017

Nilai Tukar Nelayan	111,53
Indeks Harga yang Diterima	140,12
1. Penangkapan di Laut	140,00
2. Penangkapan di Perairan Umum	134,60
Indeks Harga yang Dibayar	125,63
Indeks KRT:	133,50
1. Bahan Makanan	142,04
2. Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	130,60
3. Perumahan	125,85
4. Transportasi dan Komunikasi	125,69
5. Sandang	125,62
6. Kesehatan	124,59
7. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	115,43
Indeks BPPBM	113,17
1. Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	114,31
2. Transportasi	113,73
3. Penambahan Barang Modal	113,72
4. Upah Buruh	106,03



Gambar 2. Rincian NTN Per Agustus 2017

Korelasi dengan Nilai Produksi

NTN yang merupakan rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Apabila di suatu daerah nilai produksinya tinggi, kalau harga ikan juga tinggi, bisa menyebabkan meningkatnya nilai NTN. Dibawah ini disandingkan antara Provinsi yang memiliki nilai produksi tertinggi dan terendah, serta yang NTNnya tertinggi dan terendah.

Tabel 3. Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTN Tertinggi tahun 2015

No	Provinsi	Nilai Produksi (Rp. Milyar)	No	Provinsi	NTN
1.	Sumatera Utara	12.229	1.	Banten	116,76
2.	Jawa Timur	8.126	2.	Kalimantan Selatan	113,14
3.	Sulawesi Selatan	6.331	3.	Bali	112,98
4.	Jawa Barat	5.999	4.	Sulawesi Utara	111,42
5.	DKI Jakarta	5.978	5.	Papua	110,41
6.	Maluku	5.754	6.	Sulawesi Tengah	109,39
7.	Sumatera Selatan	5.021	7.	Riau	108,37
8.	Kalimantan Selatan	4.794	8.	Jawa Barat	107,68
9.	Sulawesi Utara	4.601	9.	Kalimantan Tengah	107,47
10.	Papua Barat	4.431	10.	DI Yogyakarta	107,23

Tabel 4. Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTN Terendah tahun 2015


No	Provinsi	Nilai Produksi (Rp. Milyar)	No	Provinsi	NTN
1.	DI Yogyakarta	88	1.	Sumatera Selatan	98,16
2.	Kalimantan Utara	496	2.	Aceh	99,97
3.	Sulawesi Barat	796	3.	Bengkulu	100,08
4.	Gorontalo	1.392	4.	Kalimantan Barat	100,57
5.	Bengkulu	1.394	5.	Sumatera Utara	100,98
6.	Jambi	1.591	6.	Sulawesi Barat	101,17
7.	Kalimantan Timur	1.685	7.	Bangka Belitung	101,44
8.	Bali	1.700	8.	Sumatera Barat	101,46
9.	Banten	1.714	9.	Maluku Utara	101,60
10.	Nusa Tenggara Timur	1.914	10.	DKI Jakarta	101,73

Dari data pada tabel 3 dan 4 tersebut terlihat bahwa tidak ada kesamaan antara provinsi yang memiliki nilai produksi tertinggi, dengan yang ber NTN tertinggi pula. Bahkan Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan yang termasuk sepuluh provinsi yang memperoleh nilai produksi tertinggi, dalam NTN tergolong sepuluh provinsi yang NTN-nya terendah. Dan sebaliknya, Banten, Bali dan DI Yogyakarta yang termasuk sepuluh provinsi NTN tertinggi, dalam nilai produksi tergolong sepuluh yang terendah. Memang setelah diukur dengan Koefisien Korelasi Spearman, ternyata tidak ada korelasi antara nilai produksi suatu provinsi dengan besaran NTN-nya. Koefisien korelasi terhitungnya $-0,100$, jauh di bawah titik kritis $0,523$.

Hasil Analisis

1. NTN dari tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami peningkatan, karena I_t mengalami peningkatan selalu lebih besar dari I_b ;
2. Dalam komponen I_t , posisi lebih tinggi/ lebih rendah tidak ada kepastian, antara penangkapan di perairan umum dan di laut;
3. Dalam komponen I_b , IKRT selalu lebih besar dari pada IBPPBM, dan harga bahan makanan sering paling mahal;
4. Tidak terdapat korelasi antara besaran nilai produksi penangkapan ikan dengan besaran NTN;
5. Sebaiknya pemilihan lokasi kabupaten dan desa untuk dijadikan sampel NTN, dipilih kawasan yang berpotensi tinggi dalam kegiatan penangkapan ikan. Tidak dipengaruhi oleh pertimbangan adanya potensi sektor pertanian dan kehutanan.





BAB IV

NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) serupa dengan NTN, adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (I_b), yang dinyatakan dengan persentase. Dengan demikian maka menggunakan NTPi dapat mengukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan pembudidaya, dalam hal ini hasil panen tambak atau kolam, terhadap barang atau jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maupun kebutuhan produksi. Apabila NTPi lebih dari 100, berarti pembudidaya ikan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Dan sebaliknya, apabila NTPi kurang dari 100, maka artinya pengeluaran pembudidaya ikan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual hasil budidayanya.

I_t NTPi adalah indeks harga komoditas ikan, udang, rumput laut atau lainnya yang dihasilkan pembudidaya, baik dari laut, air tawar, atau air payau. Nilai I_t bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu pada ikan dan lokasi yang sama.

I_b merupakan indeks harga barang yang dibelanjakan oleh pembudidaya ikan, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, maupun untuk keperluan produksi atau penambahan modal. I_b NTPi juga selalu mengalami perubahan harga. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) terdiri atas biaya untuk bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, transportasi dan komunikasi. Indeks Barang Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM), meliputi keperluan untuk pembelian benih, pupuk, obat-obatan, pakan, transportasi, penambahan barang modal, upah buruh, biaya sewa dan keperluan lain.

NTPi menjadi salah satu pilihan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan di pedesaan pada tahun dan bulan tertentu, dibandingkan dengan tahun dasarnya (saat ini menggunakan data tahun dasar 2012). Seharusnya NTPi juga di spesifikkan bagi budidaya ikan dan teknologi tertentu. Berlainan teknik dan komoditi yang dibudidayakan, tentu berbeda pula barang produksi yang dibayarnya.

Tabel 5. NTPi, It dan Ib tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata It	109,74	112,98	117,75	121,78	124,99
Pertumbuhan It (%)	-	2,95	4,22	3,42	2,64
Rata-rata Ib	107,96	111,47	118,15	123,06	126,46
Pertumbuhan Ib (%)	-	3,25	5,99	4,16	2,76
NTPi	101,65	101,36	99,66	98,96	98,84

**Gambar 3. Perkembangan Rata-rata NTPi, 2013-2017**

Dalam perbandingan antara It, Ib dan NTPi, dapat diamati terjadi kenaikan persisten pada seluruh komponen dari tahun ke tahun. Akan tetapi karena komponen **Ib** tumbuh lebih cepat dari pada komponen **It** pada setiap tahunnya, maka terjadilah fluktuasi NTPi hingga mencapai nilai di bawah 100 sejak tahun 2015.

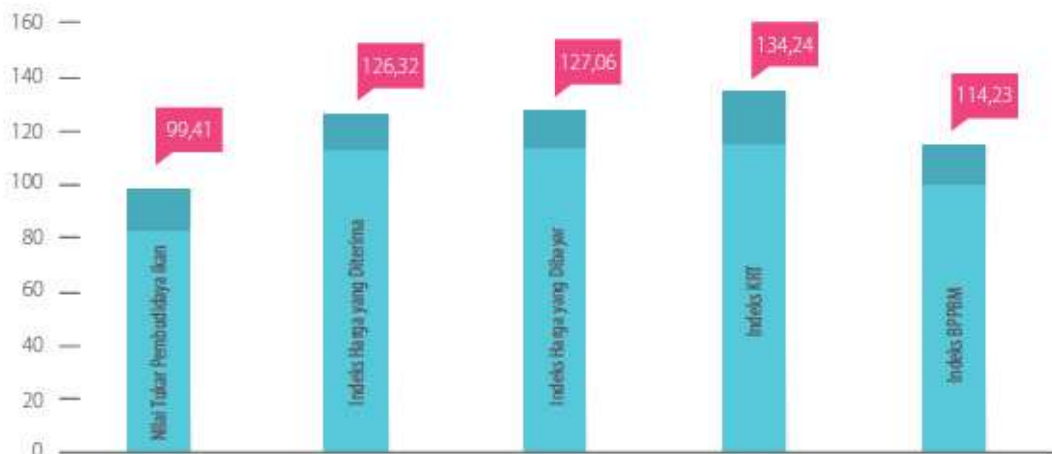
Komponen NTPi

Apabila dilihat dari komponen dari Indeks Harga yang Diterima, tidak ada kepastian komponen yang lebih besar antara budidaya air tawar dan air payau. Budidaya laut senantiasa menunjukkan nilai harga yang terendah.

Dalam komponen Indeks Harga yang Dibayar, hampir senantiasa Indeks KRT lebih besar dari Indeks BPPBM. Adapun urutan dari yang terbesar, sebagai contoh pada data NTPi bulan Agustus 2017 adalah sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6. NTPi Agustus 2017

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	99,41
Indeks Harga yang Diterima	126,32
1. Budidaya Air Tawar	126,83
2. Budidaya Air Laut	115,84
3. Budidaya Air Payau	123,90
Indeks Harga yang Dibayar	127,06
Indeks KRT:	134,24
1. Bahan Makanan	144,24
2. Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	131,83
3. Perumahan	126,70
4. Transportasi dan Komunikasi	127,78
5. Sandang	127,75
6. Kesehatan	124,85
7. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	116,32
Indeks BPPBM	114,23
1. Transportasi	120,62
2. Pupuk, Obat-obatan dan Pakan	112,56
3. Upah Buruh	113,63
4. Biaya Sewa dan Pengeluaran Lain	113,12
5. Benih	112,56
6. Penambahan Barang Modal	111,49



Gambar 4. Rincian NTPi Per Agustus 2017

Korelasi dengan Nilai Produksi

NTPi merupakan rasio antara harga hasil ikan yang diterima pembudidaya ikan dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Apabila di suatu daerah nilai produksinya tinggi, kalau harga ikan juga tinggi, bisa menyebabkan meningkatnya nilai NTPi. Pada tabel dibawah ini disandingkan antara Provinsi yang memiliki nilai produksi tertinggi dan terendah, serta yang NTPi-nya tertinggi dan terendah.

Tabel 7. Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTPi Tertinggi tahun 2015

No	Provinsi	Nilai Produksi (Rp. Milyar)	No	Provinsi	NTPi
1.	Jawa Barat	21.420	1.	Maluku Utara	109,19
2.	Sumatera Barat	11.595	2.	Maluku	108,81
3.	Jawa Timur	11.021	3.	Kepulauan Riau	108,44
4.	Nusa Tenggara Barat	8.496	4.	Sumatera Barat	108,22
5.	Jawa Tengah	6.954	5.	DI Yogyakarta	105,29
6.	Sulawesi Selatan	6.331	6.	Jawa Timur	104,94
7.	Maluku	5.754	7.	Kalimantan Selatan	102,66
8.	Sumatera Barat	5.668	8.	Riau	102,42
9.	Sumatera Utara	5.435	9.	Sulawesi Selatan	1022,08
10.	Kalimantan Selatan	4.794	10.	Sumatera Selatan	101,02

Tabel 8. Provinsi dengan Nilai Produksi dan NTPi Terendah tahun 2015

No	Provinsi	Nilai Produksi (Rp. Milyar)	No	Provinsi	NTPi
1.	Maluku Utara	110	1.	Papua	90,70
2.	Bangka Belitung	120	2.	Kalimantan Timur	90,15
3.	Papua Barat	222	3.	Bali	91,75
4.	DKI Jakarta	241	4.	Papua Barat	91,93
5.	Kalimantan Timur	458	5.	Gorontalo	92,05
6.	Bali	586	6.	Sulawesi Tengah	92,82
7.	Kepulauan Riau	606	7.	Nusa Tenggara Barat	93,11
8.	Papua	699	8.	Sumatera Utara	93,59
9.	Gorontalo	756	9.	Bangka Belitung	94,21
10.	Jambi	785	10.	DKI Jakarta	94,29

Dari data pada tabel 7 dan 8 tersebut terlihat bahwa ada beberapa kesamaan antara provinsi yang memiliki nilai produksi tertinggi, dengan yang ber NTPi tertinggi pula. Akan tetapi Maluku Utara dan Kepulauan Riau yang termasuk sepuluh provinsi yang memperoleh nilai produksi tertinggi, dalam NTPi tergolong sepuluh provinsi yang NTPi-nya terendah. Dan sebaliknya, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Utara yang termasuk sepuluh provinsi NTPi tertinggi, dalam nilai produksi tergolong sepuluh yang terendah. Memang setelah diukur dengan Koefisien Korelasi Spearman, ternyata tidak ada korelasi antara nilai produksi suatu provinsi dengan besaran NTN-nya. Koefisien korelasi terhitungnya + 0,197, jauh di bawah titik kritis 0,425.

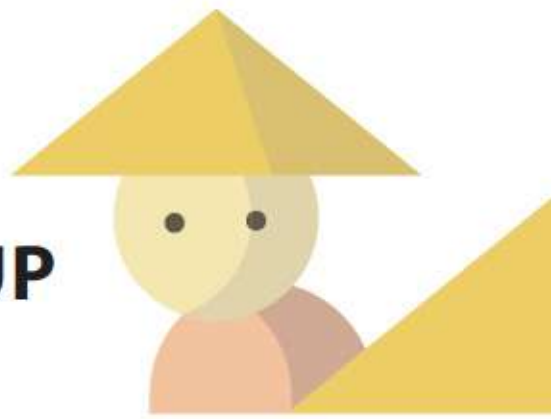
Hasil Analisis

1. NTPi dari tahun 2013 hingga 2017 terdapat fluktuasi, karena beberapa tahun Ib mengalami peningkatan lebih besar dari It;
2. Dalam komponen It, posisi lebih tinggi/ lebih rendah tidak ada kepastian, antara budidaya perikanan di air tawar dan air payau. Untuk budidaya di laut senantiasa menunjukkan nilai byang terendah;
3. Dalam komponen Ib, IKRT selalu lebih besar dari pada IBPPBM, dan harga bahan makanan sering paling mahal;
4. Tidak ada korelasi antara besaran nilai produksi budidaya perikanan dengan besaran NTPi;
5. Sebaiknya pemilihan lokasi kabupaten dan desa untuk dijadikan sampel NTPi, dipilih kawasan yang berpotensi tinggi dalam kegiatan budidaya perikanan. Tidak dipengaruhi oleh pertimbangan adanya potensi sektor pertanian dan kehutanan



BAB V

PENUTUP



Analisis Data Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pertimbangan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Buku Analisis Data ini semoga bisa menjadi pilihan referensi bagi masyarakat atau pelaku usaha, memberikan inspirasi dan mendorong gagasan untuk peningkatan kualitas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Apabila didalam substansi bahasan terdapat ungkapan kelemahan dalam metoda pendataan, kiranya juga dapat menjadi bahan perbaikan guna memperoleh data yang lebih baik pada masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2014*, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2013*, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 2015
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2015*, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, *Peta Sentra Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015*, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2015*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) Tahun 2015*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2014*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) Tahun 2014*, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, *Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)*, Direktorat Perikanan Tangkap, Jakarta, 2015.
- Jakfar dan Khasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2003.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*, Jakarta, 2016.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015*, Jakarta 2015.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
*Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: KEP/25/M.
PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Jakarta, 2004.*

Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Publikasi Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2015, Jakarta, 2015

.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rata-rata NTN Per Provinsi, 2013-2017

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017
NASIONAL	102.55	104.63	108.24	108.24	110.50
SUMATERA					
Aceh	100.62	101.20	101.33	101.33	101.99
Sumatera Utara	98.16	100.33	103.83	103.83	108.31
Sumatera Barat	101.46	101.17	105.24	105.24	109.01
Riau	103.23	106.38	116.47	116.47	121.57
Jambi	97.11	102.40	107.88	107.88	110.04
Sumatera Selatan	98.2	97.73	97.02	97.02	97.79
Bengkulu	97.12	100.10	102.43	102.43	104.01
Lampung	100.15	105.65	106.76	106.76	110.20
Kep. Bangka Belitung	100.92	102.95	107.76	107.76	109.85
Kep. Riau	104.24	106.52	109.36	109.36	110.49
JAWA					
DKI Jakarta	103.81	104.58	106.41	106.41	103.98
Jawa Barat	100.88	105.06	110.37	110.37	114.45
Jawa Tengah	106.01	106.28	109.24	109.24	110.80
D.I. Yogyakarta	103.56	105.58	111.46	111.46	116.08
Jawa Timur	102.09	106.51	111.84	111.84	120.08
Banten	108.01	113.43	119.15	119.15	120.01
BALI - NUSA TENGGARA					
Bali	111.3	113.94	111.14	111.14	115.67
Nusa Tenggara Barat	98.12	100.37	108.07	108.07	112.97
Nusa Tenggara Timur	100.67	103.22	104.55	104.55	107.83

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017
KALIMANTAN					
Kalimantan Barat	99.27	100.95	104.80	104.80	103.72
Kalimantan Tengah	105	107.82	111.59	111.59	112.67
Kalimantan Selatan	108.55	110.34	112.70	112.70	112.41
Kalimantan Timur	105.07	107.90	108.69	108.69	110.42
SULAWESI					
Sulawesi Utara	108.56	109.39	104.00	104.00	107.49
Sulawesi Tengah	99.91	102.04	114.28	114.28	116.11
Sulawesi Selatan	102.81	106.43	103.48	103.48	105.98
Sulawesi Tenggara	107.72	106.80	116.17	116.17	120.86
Gorontalo	102.4	102.84	105.55	105.55	106.96
Sulawesi Barat	94.05	95.67	105.03	105.03	108.02
MALUKU - PAPUA					
Maluku	102.83	105.39	105.36	105.36	105.49
Maluku Utara	97.44	99.42	101.50	101.50	103.73
Papua Barat	100.97	104.79	104.78	104.78	101.67
Papua	103.49	102.38	109.23	109.23	105.25

Lampiran 2. Rata-rata NTPi Per Provinsi, 2013-2017

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017
NASIONAL	101.65	101.36	99.66	98.96	98.84
SUMATERA					
Aceh	100.82	100.14	95.34	94.47	94.24
Sumatera Utara	93.82	95.20	93.59	95.86	97.31
Sumatera Barat	103.84	105.31	108.22	106.78	109.29
Riau	98.74	103.21	102.42	101.45	105.88
Jambi	98.61	100.08	97.22	95.06	94.95
Sumatera Selatan	103.36	104.83	101.02	98.79	96.11
Bengkulu	101.25	102.55	98.80	94.39	93.34
Lampung	100.46	100.43	96.89	95.56	94.52
Kep. Bangka Belitung	98.32	96.51	94.21	94.74	93.43
Kep. Riau	113.97	112.32	108.44	107.29	106.16
JAWA					
DKI Jakarta	97.82	96.11	94.29	93.43	92.82
Jawa Barat	100.81	100.68	98.11	98.22	100.52
Jawa Tengah	100.35	99.79	100.22	101.07	99.86
D.I. Yogyakarta	103.08	103.48	105.29	103.88	100.81
Jawa Timur	108.07	106.36	104.94	102.49	101.10
Banten	97.22	97.03	96.40	96.46	96.21
BALI - NUSA TENGGARA					
Bali	96.39	94.38	91.75	89.85	88.64
Nusa Tenggara Barat	96.94	96.06	93.11	89.71	90.35
Nusa Tenggara Timur	102.75	101.67	102.66	102.08	101.73

PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017
KALIMANTAN					
Kalimantan Barat	95.20	95.98	99.15	99.26	98.77
Kalimantan Tengah	96.68	96.84	96.80	97.30	95.55
Kalimantan Selatan	105.89	105.08	102.66	102.08	101.73
Kalimantan Timur	94.41	93.96	90.15	89.68	89.70
SULAWESI					
Sulawesi Utara	98.39	98.66	95.21	92.98	91.48
Sulawesi Tengah	101.15	99.12	92.82	88.95	85.31
Sulawesi Selatan	107.70	106.47	102.08	99.13	97.26
Sulawesi Tenggara	105.58	103.73	97.73	96.29	96.72
Gorontalo	92.02	92.07	92.05	89.23	85.21
Sulawesi Barat	99.41	99.21	99.20	96.21	94.71
MALUKU - PAPUA					
Maluku	116.02	114.24	108.81	105.79	102.14
Maluku Utara	109.86	109.51	109.19	107.59	104.39
Papua Barat	93.27	93.14	91.93	89.77	88.66
Papua	97.40	94.90	90.70	88.19	83.69

